

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

4

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
							<input checked="" type="checkbox"/>						

Perkara Korupsi Pajak Air Lamteng segera Disidang

KASUS korupsi pajak air di Pemkab Lampung Tengah dengan terdakwa mantan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lamteng Yunizar segera disidang pada Kamis (29/7).

Jaksa dari Kejaksaan Negeri Lamteng telah mendaftarkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang pada Senin (26/7) dengan Nomor Surat Pelimpahan, B-1284/L.8.15/Tt.1/07/2021. "Iya, tadi kami pelimpahan berkas ke PN, untuk jadwal sidangnya, sedang menunggu," ujar Kasi Intel Kejari Lamteng M Angga Mahatama kepada *Lampung Post*, Senin (26/7).

Terdakwa yang merupakan asisten II Bidang Pembangunan Pemkab Lamteng itu didakwa mencatut penerimaan pembayaran pajak penggunaan air bawah tanah PT GGP (Great Giant Pineapple) triwulan III dan IV 2017 dan triwulan I,II, III 2018.

Dari pemeriksaan auditor keuangan Negara BPKP Perwakilan Lampung, terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp983,04 juta lebih.

Ia ditetapkan tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor 01/L.8.15/Fd.1/03/2021 tertanggal 24 Maret 2021.

"Kerugian negara sudah dipulangkan seluruhnya, dititipkan ke penyidik, untuk disimpan dalam rekening penitipan sementara Kejaksaan Negeri Lamteng," kata dia.

Kejari Lamteng sudah menyiapkan sejumlah jaksa dalam perkara tersebut. "Ketua timnya Kasi Pidsus, M Rafli," ujarnya.

Yunizar juga dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai asisten II Pemkab Lamteng usai ditahan di Rutan Kelas IIB Gunung-sugih pada 8 Juli 2021 lalu. "Informasinya sudah mengundurkan diri," katanya.

Terdakwa dijerat Pasal 2 Ayat (1) subsidiar Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (RUL/KI)